



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya pengakuan Pemerintah tentang Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelancaran pelayanan dalam proses penetapan pengakuan, dipandang perlu untuk menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah guna melaksanakan pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN
PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA.

PERTAMA: Menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk
melaksanakan pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

KEDUA : Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah terlebih
dahulu dilakukan verifikasi terhadap Daftar Kewenangan
Kabupaten/Kota yang disampaikan Daerah.

KETIGA : Terhadap pelaksanaan tugasnya, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah melaporkan kepada Presiden

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan II

Edy Sudibyo